Al Iidara Balad
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

IMPLEMENTASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAWAN DAN DESA DATU KUNING

Ani[1], Jumaidi[2], Erwin Maulana[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
e-mail: anishella2606@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Rantawan dan Desa Datu Kuning, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian berangkat dari belum meratanya informasi program, lambatnya pembaruan data penerima, penerimaan bantuan sosial secara bersamaan, dan rendahnya kesadaran administrasi sebagian penerima. Penelitian menggunakan desain deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap 12 informan yang dipilih secara purposif dari Dinas Sosial, pendamping sosial, pemerintah desa, dan keluarga penerima manfaat. Analisis data mencakup reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Peneliti memperkuat kredibilitas melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPNT secara umum telah berjalan cukup baik. Informasi tersedia melalui saluran formal dan informal, tujuan kebijakan sesuai dengan kebutuhan pangan rumah tangga, partisipasi masyarakat cukup positif, dan pembagian tanggung jawab relatif jelas. Namun, pelaksanaan belum optimal karena sosialisasi tidak rutin, pemahaman masyarakat tidak seragam, verifikasi data lambat, sasaran belum sepenuhnya akurat, jaringan dan kartu bermasalah, pencairan terlambat, serta kewenangan desa terbatas dalam memperbaiki data pusat. Perbaikan perlu diarahkan pada komunikasi terjadwal, pembaruan data yang cepat dan transparan, penguatan dukungan teknis, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses.
Kata Kunci: implementasi kebijakan, BPNT, bantuan sosial, ketepatan sasaran, partisipasi masyarakat

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Rantawan and Datu Kuning Villages, Amuntai Tengah District, Hulu Sungai Utara Regency. The study addresses uneven program information, delayed updating of beneficiary data, overlapping social assistance, and limited administrative awareness among beneficiaries. A descriptive qualitative design was applied. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving 12 purposively selected informants from the Social Affairs Office, social facilitators, village governments, and beneficiary families. Data were analyzed through reduction, display, and conclusion drawing, while credibility was strengthened through source, technique, and time triangulation. The findings show that BPNT has generally been implemented fairly well. Information is available through formal and informal channels, policy objectives are relevant to household food needs, community participation is positive, and responsibilities among implementers are relatively clear. Nevertheless, implementation remains constrained by irregular socialization, inconsistent understanding, slow data verification, targeting inaccuracies, network and card problems, delayed disbursement, and limited village authority to revise central data. Effective implementation therefore requires scheduled communication, faster and transparent data updating, stronger technical support, and an accessible complaint mechanism.
***Keywords**: policy implementation, BPNT, social assistance, targeting accuracy, community participation*

PENDAHULUAN

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan. Kemiskinan juga membatasi kemampuan rumah tangga dalam memperoleh pangan, pendidikan, layanan kesehatan, tempat tinggal yang layak, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Kondisi tersebut

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

menempatkan perlindungan sosial sebagai bagian penting dari kebijakan publik. Pemerintah perlu merancang program yang tidak sekadar memindahkan sumber daya kepada kelompok miskin, tetapi juga memastikan bahwa bantuan diterima oleh rumah tangga yang tepat, pada waktu yang tepat, dalam jumlah yang sesuai, dan melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Program bantuan sosial karena itu harus dinilai dari dua sisi. Sisi pertama menyangkut manfaat langsung bagi keluarga penerima. Sisi kedua menyangkut kualitas pelaksanaan, terutama akurasi data, keterbukaan informasi, koordinasi lembaga, dan kemampuan pelaksana menyelesaikan masalah di lapangan.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang dalam perkembangan kebijakan juga dikenal sebagai Program Sembako, menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan. Program ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga, meningkatkan ketepatan penyaluran, dan membangun sistem bantuan sosial yang lebih tertib. Pedoman umum BPNT menekankan ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas, harga, dan administrasi sebagai ukuran penting keberhasilan penyaluran (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2017). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 kemudian mengatur pelaksanaan Program Sembako secara non tunai dan menegaskan kebutuhan penyaluran yang efisien, akuntabel, serta mendukung peningkatan manfaat bagi penerima (Pemerintah Republik Indonesia, 2023). Kerangka tersebut menunjukkan bahwa bantuan pangan tidak cukup dinilai dari tersalurnya dana. Pemerintah juga harus menjamin bahwa mekanisme penyaluran, pendataan, dan pengaduan bekerja secara konsisten.

Implementasi kebijakan menjadi tahap yang menentukan karena keputusan pemerintah baru menghasilkan manfaat setelah pelaksana menerjemahkannya ke dalam tindakan operasional. Pada tahap ini, tujuan kebijakan berhadapan dengan kemampuan organisasi, sumber daya, perilaku pelaksana, struktur kewenangan, dan kondisi kelompok sasaran. Agustino (2020) menjelaskan bahwa implementasi menghubungkan keputusan kebijakan dengan hasil yang diterima masyarakat. Pramono (2020) juga menempatkan implementasi sebagai proses yang melibatkan penerjemahan tujuan, penggunaan sumber daya, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi terhadap hasil. Dengan demikian, masalah implementasi dapat muncul meskipun dasar hukum program telah jelas. Hambatan dapat berasal dari komunikasi yang tidak teratur, data yang tidak mutakhir, pembagian kewenangan yang terlalu panjang, sarana teknologi yang lemah, atau rendahnya partisipasi masyarakat dalam memperbarui informasi sosial ekonominya.

Penelitian ini menggunakan model implementasi Jan Merse sebagaimana dijelaskan oleh Kadji (2015). Model tersebut menempatkan informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi sebagai faktor utama. Informasi menjamin bahwa pelaksana dan kelompok sasaran memahami tujuan, prosedur, jadwal, dan perubahan kebijakan. Isi kebijakan menilai kejelasan tujuan, kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, dan kepastian manfaat.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Dukungan masyarakat mencakup partisipasi, penerimaan, kepatuhan, dan kesediaan masyarakat memberi informasi yang benar. Pembagian potensi membahas pembagian tanggung jawab, komitmen pelaksana, koordinasi, serta keterbukaan proses verifikasi data. Keempat faktor tersebut saling berhubungan. Informasi yang lemah dapat menurunkan dukungan masyarakat. Data yang tidak diperbarui dapat mengurangi ketepatan isi kebijakan. Pembagian kewenangan yang tidak responsif dapat memperlambat penyelesaian pengaduan.

Pelaksanaan BPNT pada tingkat desa menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena pemerintah desa berada paling dekat dengan keluarga penerima manfaat, tetapi tidak selalu memiliki kewenangan akhir dalam menetapkan atau mengubah data. Pemerintah desa mengetahui perubahan kondisi warga, menerima laporan kematian, perpindahan, perubahan komposisi keluarga, dan perubahan tingkat kesejahteraan. Namun, proses perubahan data harus melewati mekanisme verifikasi, validasi, dan penetapan melalui sistem yang melibatkan lembaga lain. Jarak antara pengetahuan lokal dan otoritas penetapan tersebut dapat menimbulkan keterlambatan. Ketika pembaruan data tidak segera diproses, bantuan dapat tetap diterima oleh warga yang kondisi ekonominya telah membaik, sedangkan keluarga lain yang lebih membutuhkan belum masuk ke dalam daftar penerima.

Persoalan lain berkaitan dengan penerimaan BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH) secara bersamaan. Kedua program memiliki sasaran yang sama-sama berasal dari keluarga miskin dan rentan, tetapi mempunyai komponen manfaat dan kriteria yang berbeda. Karena itu, penerimaan dua program oleh satu keluarga tidak otomatis menunjukkan kesalahan. Masalah muncul ketika masyarakat tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai perbedaan kriteria tersebut. Ketiadaan penjelasan dapat melahirkan persepsi bahwa bantuan dibagikan secara tidak adil. Persepsi ini semakin kuat ketika masyarakat melihat penerima yang dianggap sudah mampu masih terdaftar, sementara warga lain yang dinilai layak belum menerima bantuan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa transparansi kriteria dan kecepatan pembaruan data merupakan unsur substantif, bukan sekadar urusan administrasi.

Penelitian terdahulu memperlihatkan pola masalah yang serupa. Syaputra (2023) menemukan bahwa implementasi BPNT di Kecamatan Kuantan Tengah berjalan cukup baik pada sebagian besar indikator, tetapi masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan kebutuhan sosialisasi yang lebih konsisten. Mufatiroh, Ratnawati dan Kurniawan (2021) menunjukkan bahwa pelaksanaan BPNT melalui e-warung memerlukan koordinasi, ketepatan data, dan pelayanan penyalur yang memadai. Nirmawati (2025) menemukan bahwa pelaksanaan BPNT di Desa Kota Raden Hulu belum optimal karena sosialisasi terbatas, gangguan transaksi, keterlambatan penyaluran, pemahaman masyarakat yang rendah, dan pembaruan data yang belum efektif. Temuan tersebut menegaskan bahwa keberadaan sistem non tunai tidak secara otomatis menyelesaikan masalah implementasi.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Teknologi perlu ditopang oleh informasi yang jelas, pelaksana yang responsif, data yang akurat, dan keterlibatan masyarakat.

Desa Rantawan dan Desa Datu Kuning berada di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dokumen penerima yang digunakan dalam penelitian mencatat 94 keluarga penerima manfaat di Desa Rantawan dan 77 keluarga penerima manfaat di Desa Datu Kuning. Hasil pengamatan awal menunjukkan tiga fenomena utama. Pertama, sebagian keluarga menerima BPNT sekaligus PKH dan kondisi ini menimbulkan pertanyaan masyarakat mengenai dasar penetapan penerima. Kedua, kesadaran administrasi sebagian masyarakat masih rendah, terutama dalam melaporkan perubahan anggota keluarga dan kondisi ekonomi. Ketiga, sosialisasi khusus BPNT belum berlangsung rutin sehingga informasi mengenai mekanisme pencairan, perubahan data, penghentian bantuan, dan prosedur pengaduan tidak dipahami secara merata.

Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dari penelitian terdahulu karena membandingkan pelaksanaan BPNT pada dua desa dalam kecamatan yang sama dan menempatkan hubungan antara informasi, akurasi data, dukungan masyarakat, serta pembagian kewenangan sebagai pusat analisis. Penelitian bertujuan menganalisis implementasi BPNT di Desa Rantawan dan Desa Datu Kuning berdasarkan empat indikator model Jan Merse. Penelitian juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pelaksanaan program. Hasil penelitian diharapkan memberi masukan bagi Dinas Sosial, pemerintah desa, pendamping sosial, dan lembaga penyalur untuk memperbaiki sosialisasi, pembaruan data, penanganan pengaduan, dan koordinasi penyaluran bantuan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berupaya memahami proses implementasi BPNT berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan penilaian aktor yang terlibat. Penelitian tidak hanya mengidentifikasi apakah bantuan telah disalurkan, tetapi juga menelaah cara informasi disampaikan, cara tujuan kebijakan dipahami, bentuk dukungan masyarakat, pembagian tanggung jawab, serta faktor yang mempermudah dan menghambat pelaksanaan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali perbedaan pengalaman antara pelaksana program dan keluarga penerima manfaat. Fiantika et al. (2022) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menempatkan konteks, pengalaman subjek, dan makna data sebagai dasar penyusunan interpretasi.

Lokasi penelitian meliputi Desa Rantawan dan Desa Datu Kuning, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peneliti memilih kedua desa karena keduanya melaksanakan BPNT, memiliki jumlah penerima yang cukup besar, dan menunjukkan masalah implementasi yang relevan dengan fokus penelitian. Sasaran penelitian mencakup pelaksana kebijakan pada tingkat kabupaten dan desa serta masyarakat penerima bantuan. Peneliti memilih informan dengan teknik

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan terhadap pelaksanaan program. Jumlah informan sebanyak 12 orang. Informan terdiri atas Kepala Dinas Sosial, pendamping BPNT, Kepala Desa Rantawan, perwakilan Kepala Desa Datu Kuning, aparat dari masing-masing desa, serta enam keluarga penerima manfaat yang terbagi secara seimbang pada kedua desa.

Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat proses penyampaian informasi, kegiatan sosialisasi, pelayanan pencairan, keterlibatan aparat desa, serta respons penerima manfaat. Wawancara menggunakan pedoman yang disusun berdasarkan indikator informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi. Dokumentasi mencakup daftar penerima, data administrasi desa, foto kegiatan, catatan sosialisasi, dan dokumen kebijakan. Penggunaan beberapa teknik memberi kesempatan kepada peneliti untuk membandingkan keterangan informan dengan kondisi lapangan dan dokumen yang tersedia. Hardani et al. (2020) menegaskan bahwa kombinasi observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat memperkuat pemahaman terhadap fenomena sosial yang diteliti.

Analisis data berlangsung sejak pengumpulan data hingga penyusunan kesimpulan. Peneliti mereduksi data dengan memilih informasi yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian, mengelompokkan temuan menurut empat indikator Jan Merse, dan membedakan temuan antara Desa Rantawan dan Desa Datu Kuning. Data kemudian disajikan dalam uraian tematik dan tabel sintesis. Peneliti menarik kesimpulan melalui perbandingan antarsumber, pencarian pola yang berulang, identifikasi perbedaan pengalaman, dan pengaitan temuan dengan teori serta penelitian terdahulu. Kredibilitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Peneliti membandingkan keterangan Dinas Sosial, pendamping, aparat desa, dan penerima manfaat; memeriksa kesesuaian wawancara dengan observasi dan dokumen; serta melakukan pengecekan pada waktu yang berbeda. Peneliti juga menggunakan bahan dokumentasi dan konfirmasi kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi sesuai dengan pengalaman mereka.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan BPNT di Desa Rantawan dan Desa Datu Kuning melibatkan rantai aktor yang cukup panjang. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan dan data penerima. Dinas Sosial mengoordinasikan pelaksanaan di daerah, melakukan verifikasi, menyampaikan informasi, dan menindaklanjuti persoalan. Pendamping sosial berinteraksi langsung dengan keluarga penerima, sedangkan pemerintah desa dan RT memfasilitasi sosialisasi, pendataan, serta penyampaian laporan masyarakat. Lembaga penyalur dan titik layanan membantu proses pencairan. Struktur ini telah membuat program berjalan dan manfaat diterima masyarakat. Namun, struktur yang berjenjang juga menimbulkan jeda ketika data perlu diubah atau masalah membutuhkan keputusan dari tingkat yang

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

lebih tinggi. Temuan penelitian karena itu menunjukkan hasil yang tidak sepenuhnya hitam dan putih. Sebagian unsur implementasi berjalan cukup baik, tetapi beberapa unsur belum bekerja secara konsisten.

Tabel 2. Sintesis Temuan Implementasi BPNT

Indikator	Desa Rantawan	Desa Datu Kuning	Penilaian
Informasi	Saluran informasi tersedia, tetapi sosialisasi khusus BPNT tidak rutin. Penerima baru lebih banyak memperoleh informasi saat pencairan.	Rapat desa, RT, kantor pos, grup komunikasi, dan kabar antarwarga menjadi saluran utama. Penjelasan BPNT sering bercampur dengan PKH.	Cukup baik, belum merata
Isi kebijakan	Tujuan dan manfaat dipahami. Masih ditemukan warga layak yang belum terdata, penerima yang dinilai sudah mampu, dan penggunaan bantuan yang tidak sesuai.	Program dinilai relevan dengan kebutuhan pangan. Masalah muncul pada ketepatan sasaran, keterlambatan, dan pemahaman mengenai penerima ganda.	Relevan, tetapi belum sepenuhnya tepat sasaran
Dukungan masyarakat	Masyarakat mengikuti rapat, melengkapi dokumen, dan melaporkan perubahan. Kepatuhan pembaruan data belum merata.	Partisipasi dan penerimaan cukup baik. Sebagian warga pasif melapor dan masih bergantung pada RT atau pendamping.	Cukup positif
Pembagian potensi	Peran Dinas Sosial, pendamping, desa, dan masyarakat cukup jelas. Desa terbatas dalam mengubah data pusat.	Koordinasi berjalan, tetapi verifikasi dan perubahan data lambat. Hambatan jaringan dan distribusi kartu masih terjadi.	Cukup jelas, belum responsif

Informasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi BPNT telah disampaikan melalui beberapa jalur. Dinas Sosial dan pendamping sosial menyampaikan informasi kepada pemerintah desa. Pemerintah desa memfasilitasi rapat, menyediakan tempat, dan meneruskan informasi kepada masyarakat. Ketua RT membantu menyampaikan undangan atau jadwal pencairan. Kantor pos dan lembaga penyalur memberikan informasi pada saat penyaluran. Selain itu, penerima manfaat saling bertukar kabar melalui komunikasi langsung dan grup pesan. Keberagaman saluran tersebut membantu masyarakat mengetahui bahwa bantuan telah tersedia. Sejumlah penerima bahkan dapat mengecek saldo melalui rekening atau kartu sehingga mengetahui pencairan sebelum pemberitahuan resmi diterima.

Di Desa Rantawan, pendamping sosial menjadi sumber informasi utama. Kepala desa dan aparat desa lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Sosialisasi pernah dilakukan melalui rapat bersama penerima bantuan sosial, tetapi kegiatan tersebut tidak memiliki jadwal rutin dan tidak selalu membahas BPNT secara khusus. Penerima yang sekaligus menjadi peserta PKH cenderung memperoleh informasi lebih banyak karena mengikuti pertemuan yang lebih teratur. Sebaliknya, penerima BPNT yang tidak terhubung dengan kegiatan PKH memiliki pengetahuan lebih terbatas. Penerima baru menyatakan bahwa mereka memperoleh penjelasan lebih banyak dari petugas ketika mengambil bantuan dibandingkan dari sosialisasi desa. Temuan ini memperlihatkan kesenjangan informasi berdasarkan intensitas interaksi penerima dengan pendamping.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Di Desa Datu Kuning, informasi disampaikan melalui rapat di balai desa, ketua RT, pendamping, kantor pos, komunikasi antarwarga, dan media pesan. Masyarakat relatif mudah mengetahui waktu pencairan, tetapi tidak selalu memahami alasan perubahan status penerima, mekanisme pembaruan data, atau perbedaan antara BPNT dan PKH. Sebagian rapat lebih banyak membahas PKH sehingga penerima BPNT tidak memperoleh penjelasan yang mendalam. Komunikasi dari mulut ke mulut mempercepat penyebaran jadwal, tetapi isi pesan dapat berubah dan tidak selalu seragam. Akibatnya, masyarakat mengetahui bahwa bantuan cair, tetapi belum tentu memahami dasar kebijakan dan hak administratifnya.

Masalah informasi juga terlihat ketika saldo bantuan masuk lebih dahulu daripada pemberitahuan resmi. Kondisi tersebut tidak selalu menghambat pencairan bagi penerima yang dapat mengecek rekening. Namun, penerima lanjut usia, penerima yang tidak memahami fasilitas perbankan, atau penerima yang bergantung pada keluarga lain menjadi lebih rentan tertinggal. Informasi yang hanya berfokus pada jadwal pencairan juga belum cukup. Penerima membutuhkan penjelasan mengenai tujuan bantuan, komoditas atau kebutuhan yang dapat dipenuhi, prosedur ketika kartu rusak, cara melaporkan perubahan data, alasan penghentian bantuan, dan saluran pengaduan. Tanpa informasi tersebut, penerima cenderung memahami program hanya sebagai penerimaan dana berkala.

Berdasarkan model Jan Merse, indikator informasi tidak hanya mengukur keberadaan pesan, tetapi juga kejelasan dan kesamaan pemahaman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa saluran komunikasi tersedia, tetapi keteraturan, kedalaman, dan konsistensi pesan masih lemah. Kondisi ini sejalan dengan temuan Syaputra (2023) dan Nirmawati (2025) yang menempatkan sosialisasi sebagai unsur penting dalam implementasi BPNT. Informasi informal dapat dipertahankan sebagai jalur pendukung, tetapi pelaksana perlu menyediakan informasi resmi yang sederhana dan berulang. Dinas Sosial, pendamping, dan desa dapat menggunakan jadwal sosialisasi berkala, lembar informasi satu halaman, papan pengumuman, grup pesan resmi, serta nomor pengaduan. Langkah tersebut akan mengurangi ketergantungan pada kabar antarwarga dan memberi akses yang lebih setara kepada seluruh penerima.

Isi Kebijakan

Tujuan BPNT telah dipahami secara umum oleh pelaksana dan masyarakat. Kepala Dinas Sosial, pendamping, aparat desa, dan keluarga penerima menjelaskan bahwa program membantu memenuhi kebutuhan pangan dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Penerima merasakan manfaat langsung karena bantuan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dalam konteks ini, isi kebijakan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Manfaat tersebut juga mendukung tujuan perlindungan sosial karena pengeluaran untuk pangan menyerap bagian penting

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

dari pendapatan rumah tangga berpenghasilan rendah. Kesesuaian tujuan dan kebutuhan menjadi alasan utama masyarakat menerima program secara positif.

Walaupun tujuan program jelas, ketepatan sasaran masih menjadi masalah utama. Informan menemukan masyarakat yang dianggap layak tetapi belum terdaftar, sementara beberapa penerima dinilai telah memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik. Masalah tersebut tidak selalu muncul karena kesengajaan pelaksana. Data penerima berasal dari sistem yang diperbarui melalui proses berjenjang. Perubahan kondisi warga dapat berlangsung lebih cepat daripada proses administrasi. Ketika keluarga mengalami penurunan pendapatan, mereka tidak segera masuk ke dalam daftar. Sebaliknya, ketika kondisi penerima membaik, namanya dapat tetap tercatat selama perubahan belum dilaporkan, diverifikasi, dan ditetapkan. Ketidaksesuaian antara data dan kondisi aktual kemudian memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan program.

Penerimaan BPNT dan PKH oleh keluarga yang sama menjadi isu yang sering dibicarakan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerima dapat memperoleh kedua program apabila memenuhi kriteria masing-masing. PKH memiliki komponen yang berkaitan dengan kondisi keluarga, seperti pendidikan, kesehatan, lanjut usia, atau disabilitas, sedangkan BPNT berfokus pada dukungan pangan. Karena itu, tumpang tindih penerima tidak selalu berarti duplikasi yang keliru. Persoalan muncul ketika pelaksana tidak menjelaskan dasar tersebut secara terbuka. Warga yang hanya melihat jumlah bantuan cenderung menilai distribusi tidak merata. Penjelasan mengenai perbedaan tujuan, kriteria, dan komponen manfaat perlu menjadi materi wajib sosialisasi agar masyarakat dapat membedakan penerimaan yang sah dari kesalahan data.

Temuan lain berkaitan dengan pemanfaatan bantuan. Sebagian besar penerima menggunakan bantuan untuk kebutuhan rumah tangga. Namun, pelaksana masih menemukan penggunaan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan pangan, termasuk penarikan atau pemanfaatan oleh pihak lain. Fleksibilitas dalam mekanisme penyaluran memberi ruang kepada keluarga untuk menyesuaikan kebutuhan, tetapi fleksibilitas tersebut perlu disertai edukasi dan pengawasan yang proporsional. Pendamping tidak perlu mengendalikan setiap keputusan rumah tangga, tetapi harus memastikan bahwa penerima memahami tujuan program dan tidak menyerahkan kartu, rekening, atau akses transaksi kepada pihak yang tidak berhak.

Kepastian manfaat juga dipengaruhi oleh waktu penyaluran. Informan menyatakan bahwa bantuan pada umumnya diterima, tetapi sesekali terjadi keterlambatan karena proses administrasi, gangguan jaringan, distribusi kartu, atau sistem penyalur. Bagi rumah tangga yang bergantung pada bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, keterlambatan memiliki dampak nyata. Ketepatan waktu karena itu harus dipahami sebagai bagian dari isi kebijakan, bukan sekadar persoalan teknis. Pelaksana perlu menyampaikan informasi apabila terjadi perubahan jadwal dan menyediakan prosedur penanganan bagi penerima yang gagal melakukan transaksi.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Secara analitis, indikator isi kebijakan telah terpenuhi pada aspek kejelasan tujuan dan relevansi manfaat, tetapi belum optimal pada aspek ketepatan sasaran, kepastian waktu, dan konsistensi penggunaan. Temuan ini mendukung penjelasan Mufatiroh, Ratnawati dan Kurniawan (2021) bahwa keberhasilan BPNT membutuhkan hubungan antara desain program, akurasi data, dan kualitas pelayanan penyaluran. Perbaikan isi kebijakan pada tingkat implementasi dapat dilakukan melalui pemutakhiran data yang terjadwal, penjelasan tertulis mengenai kriteria, pelacakan status usulan perubahan data, dan pengawasan terhadap pemanfaatan kartu. Dengan cara tersebut, masyarakat tidak hanya menerima manfaat, tetapi juga memahami dasar dan batas penggunaan program.

Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat terlihat dalam beberapa bentuk. Penerima menghadiri rapat atau sosialisasi, menyerahkan KTP dan kartu keluarga, mengikuti prosedur pencairan, serta berkomunikasi dengan RT, aparat desa, dan pendamping ketika mengalami masalah. Masyarakat juga membantu menyebarkan informasi pencairan kepada penerima lain. Di kedua desa, program diterima secara positif karena manfaatnya dirasakan langsung. Tidak ditemukan penolakan terbuka terhadap tujuan program. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat penerimaan yang cukup baik dan memandang BPNT sebagai bantuan yang relevan dengan kebutuhan mereka.

Dukungan nonfisik terlihat dari kesediaan sebagian warga melaporkan perubahan data. Informan menyebut perubahan seperti kematian anggota keluarga, perpindahan, perubahan komposisi keluarga, dan peningkatan kondisi ekonomi perlu dilaporkan agar data tetap sesuai. Beberapa penerima memahami kewajiban tersebut dan bersedia mengundurkan diri ketika merasa tidak lagi layak. Praktik ini penting karena pemerintah tidak dapat memperbarui seluruh kondisi rumah tangga hanya melalui pemeriksaan administratif. Partisipasi masyarakat menjadi sumber informasi yang melengkapi data pemerintah.

Meskipun demikian, kesadaran administrasi belum merata. Sebagian masyarakat tidak segera melaporkan perubahan kondisi. Ada penerima yang tetap menggunakan bantuan meskipun keadaan ekonominya membaik. Sebagian warga juga tidak mengetahui prosedur pengaduan atau menganggap proses perubahan data terlalu lama. Ketika laporan tidak menghasilkan perubahan dalam waktu dekat, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan dan memilih tidak lagi melapor. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh sikap masyarakat. Respons sistem terhadap laporan juga memengaruhi kesediaan masyarakat berpartisipasi.

Persepsi keadilan turut menentukan dukungan. Keluhan tentang penerima ganda, penerima yang dinilai tidak layak, warga miskin yang belum terdaftar, atau bantuan yang diambil pihak lain dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Di beberapa situasi, masyarakat memilih tidak membicarakan daftar penerima secara terbuka untuk menjaga hubungan sosial. Pilihan tersebut dapat

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

meredam konflik jangka pendek, tetapi juga membatasi transparansi. Pemerintah desa perlu mencari keseimbangan antara perlindungan data pribadi dan keterbukaan proses. Informasi yang dibuka tidak harus berupa seluruh data pribadi penerima. Desa dapat menjelaskan kriteria, tahapan verifikasi, jumlah usulan, status tindak lanjut, dan jalur keberatan tanpa mengungkap informasi sensitif.

Model Jan Merse menempatkan dukungan masyarakat sebagai kondisi penting bagi keberlanjutan program. Temuan penelitian menunjukkan dukungan masyarakat tergolong cukup baik, tetapi belum optimal. Partisipasi lebih banyak muncul ketika masyarakat menerima manfaat atau menghadapi masalah pencairan. Partisipasi dalam pemutakhiran data dan pengawasan masih bergantung pada inisiatif individu. Pelaksana perlu mengubah pola ini menjadi partisipasi yang terstruktur. RT dan desa dapat membuka periode pembaruan data secara berkala, menyediakan formulir laporan sederhana, memberi bukti penerimaan laporan, dan menyampaikan perkembangan usulan. Mekanisme tersebut akan memperkuat rasa memiliki sekaligus meningkatkan akurasi data.

Temuan ini sejalan dengan Nirmawati (2025) yang menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap pelaksanaan BPNT. Namun, penelitian ini menambahkan bahwa dukungan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kualitas respons pelaksana. Masyarakat lebih mungkin melapor apabila mereka memahami prosedur dan melihat bahwa laporan ditindaklanjuti. Oleh karena itu, peningkatan dukungan perlu dilakukan melalui dua arah. Masyarakat perlu meningkatkan kejujuran dan kepatuhan administrasi, sedangkan pemerintah perlu menyediakan proses yang cepat, terbuka, dan mudah dipantau.

Pembagian Potensi

Pembagian potensi dalam penelitian ini berkaitan dengan distribusi tanggung jawab, kewenangan, sumber daya, dan komitmen antaraktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian peran telah terbentuk. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan dan data penerima. Dinas Sosial mengoordinasikan pelaksanaan daerah, melakukan verifikasi dan validasi, serta menindaklanjuti persoalan. Pendamping sosial menyampaikan informasi, mendampingi penerima, dan membantu penyelesaian masalah. Pemerintah desa menyediakan fasilitas, meneruskan informasi, menerima laporan, dan mengusulkan perubahan data. RT membantu menjangkau masyarakat. Lembaga penyalur melayani pencairan, sedangkan penerima bertanggung jawab menggunakan bantuan dan melaporkan perubahan kondisi.

Di Desa Rantawan, aparat desa dan pendamping sosial menunjukkan komitmen yang cukup baik. Pendamping memberikan penjelasan, melaksanakan rapat, melakukan absensi, dan membantu penerima ketika mengalami kendala. Pemerintah desa menyediakan tempat, membantu koordinasi, serta menyampaikan laporan masyarakat. Namun, pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk mengubah daftar penerima secara langsung. Desa hanya dapat mengusulkan perubahan dan menunggu proses pada sistem yang lebih tinggi. Keterbatasan ini sering menempatkan aparat desa

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

pada posisi sulit karena masyarakat menyampaikan keluhan kepada desa, sedangkan keputusan akhir berada di luar kewenangan desa.

Di Desa Datu Kuning, RT, aparat desa, pendamping PKH atau pendamping sosial, operator desa, dan masyarakat terlibat dalam pendataan, sosialisasi, serta pencairan. Koordinasi dinilai cukup aktif. Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan dokumen KTP dan kartu keluarga, rapat desa, kunjungan lapangan, serta laporan masyarakat. Walaupun mekanisme tersebut tersedia, proses pembaruan data masih lambat. Informan masih menemukan penerima yang datanya tidak sesuai kondisi aktual, penerima ganda, dan warga yang belum memahami alasan perubahan status bantuan. Gangguan jaringan dan keterlambatan distribusi kartu juga menunjukkan bahwa pembagian peran administratif belum selalu didukung sumber daya teknis yang memadai.

Keterbukaan verifikasi menjadi bagian yang belum konsisten. Beberapa informan menilai proses telah terbuka karena masyarakat dapat menyampaikan usulan dan memperoleh penjelasan dalam rapat. Informan lain hanya mengetahui daftar nama pada saat pencairan dan tidak memahami proses penilaian atau status usulan. Perbedaan pengalaman tersebut menunjukkan bahwa transparansi bergantung pada kedekatan penerima dengan rapat, pendamping, atau aparat desa. Transparansi perlu dibakukan. Desa dan Dinas Sosial dapat memberikan nomor registrasi laporan, status usulan, alasan administratif ketika usulan belum diproses, dan informasi mengenai tahapan berikutnya. Langkah ini tidak mengubah kewenangan pusat, tetapi meningkatkan akuntabilitas pada setiap tahap.

Koordinasi antaraktor telah membantu program tetap berjalan, tetapi koordinasi belum sepenuhnya menghasilkan respons cepat. Data yang tidak sinkron, NIK ganda, keterlambatan surat, gangguan jaringan, kartu rusak, dan lambatnya perubahan data memperlihatkan adanya titik lemah pada hubungan antarunit. Literatur implementasi kebijakan menempatkan kemampuan menerjemahkan kebijakan, ketersediaan sumber daya, jumlah pelaksana, dan akuntabilitas sebagai faktor keberhasilan. Dalam konteks penelitian ini, pembagian tugas sudah ada, tetapi sumber daya dan akuntabilitas tindak lanjut perlu diperkuat. Setiap pengaduan perlu memiliki penanggung jawab, batas waktu, dan hasil yang dapat diketahui masyarakat.

Berdasarkan model Jan Merse, indikator pembagian potensi tergolong cukup baik dari sisi struktur peran dan komitmen pelaksana. Namun, indikator ini belum optimal dari sisi kecepatan koordinasi, keterbukaan verifikasi, dan kemampuan desa merespons perubahan data. Temuan tersebut memperjelas bahwa desentralisasi pelayanan tidak selalu diikuti desentralisasi keputusan. Pemerintah desa dekat dengan masalah, tetapi data dan keputusan tetap bergantung pada sistem pusat. Solusi yang realistis bukan memindahkan seluruh kewenangan kepada desa, melainkan memperkuat mekanisme usulan, memastikan umpan balik, menetapkan jadwal pemutakhiran, dan membuka akses pemantauan status usulan bagi aparat desa serta pendamping.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung utama berasal dari kejelasan regulasi, dukungan pemerintah daerah, keterlibatan pemerintah desa, kerja sama dengan pendamping dan lembaga penyalur, serta penerimaan masyarakat. Ketersediaan data awal penerima melalui sistem kesejahteraan sosial membantu pemerintah menentukan sasaran dan melakukan penyaluran. Penggunaan rekening, kartu, atau mekanisme elektronik meningkatkan pencatatan transaksi dan mengurangi penggunaan uang tunai dalam rantai distribusi. Keberadaan agen atau titik layanan yang dekat juga membantu penerima mengakses bantuan. Komitmen aparat desa dan pendamping menjadi faktor penting karena mereka berhadapan langsung dengan masalah penerima.

Program juga memperoleh dukungan dari manfaat yang mudah dirasakan. Masyarakat dapat menghubungkan BPNT dengan pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Manfaat langsung membuat tingkat penerimaan program cukup tinggi. Tidak ditemukan konflik politik yang signifikan dalam pelaksanaan di kedua desa. Lingkungan sosial pada dasarnya mendukung keberlanjutan program. Kondisi ini menjadi modal penting untuk melakukan perbaikan karena pelaksana tidak perlu membangun penerimaan dari awal. Pemerintah hanya perlu meningkatkan kualitas layanan dan keadilan proses.

Faktor penghambat yang paling dominan adalah akurasi dan pembaruan data. Data penerima belum selalu menggambarkan kondisi aktual. Perubahan ekonomi keluarga, kematian, perpindahan, perbedaan NIK, dan komposisi keluarga membutuhkan pembaruan yang cepat. Proses yang lambat menimbulkan penerima tidak tepat sasaran dan warga layak yang belum terakomodasi. Hambatan kedua adalah komunikasi. Sosialisasi tidak rutin, materi BPNT bercampur dengan program lain, dan informasi resmi sering datang terlambat. Hambatan ketiga berkaitan dengan teknologi dan pelayanan penyalur, seperti jaringan tidak stabil, mesin transaksi bermasalah, kartu rusak atau terlambat, antrean, dan keterlambatan saldo.

Hambatan berikutnya berasal dari kapasitas pelaksana dan kondisi penerima. Jumlah pendamping dan aparat yang menangani program terbatas dibandingkan jumlah penerima. Sebagian penerima lanjut usia memiliki kesulitan menggunakan layanan elektronik atau menjangkau titik pencairan. Sebagian masyarakat tidak mengetahui prosedur pengaduan, tidak melaporkan perubahan data, atau menyerahkan akses kartu kepada pihak lain. Faktor teknis dan sosial tersebut saling memperkuat. Gangguan sistem menjadi lebih berat ketika penerima tidak memahami prosedur. Sebaliknya, sosialisasi yang baik tidak akan menyelesaikan masalah apabila jaringan dan mekanisme pembaruan data tetap lambat.

Temuan penelitian memperkuat hasil Syaputra (2023), Mufatiroh, Ratnawati dan Kurniawan (2021), serta Nirmawati (2025). Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa manfaat BPNT dapat berjalan berdampingan dengan masalah sumber daya, komunikasi, transaksi, dan ketepatan data.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Penelitian ini memberi penekanan tambahan pada kesenjangan antara pengetahuan lokal dan kewenangan perubahan data. Aparat desa mengetahui kondisi warga, tetapi sistem penetapan membuat desa harus menunggu keputusan di tingkat lain. Kesenjangan tersebut perlu dikelola melalui prosedur tindak lanjut yang jelas, bukan hanya melalui penambahan sosialisasi.

Secara keseluruhan, implementasi BPNT di Desa Rantawan dan Desa Datu Kuning dapat dinilai cukup baik, tetapi belum optimal. Program telah mencapai manfaat dasar karena bantuan diterima dan digunakan oleh banyak keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan. Keempat indikator Jan Merse telah berjalan pada tingkat tertentu. Namun, kualitas implementasi belum konsisten karena informasi tidak merata, ketepatan data masih dipersoalkan, dukungan administratif masyarakat belum penuh, dan koordinasi belum menghasilkan pembaruan yang cepat. Perbaikan perlu menggabungkan komunikasi, data, teknologi, dan akuntabilitas. Menangani satu faktor secara terpisah tidak akan cukup karena masalah implementasi saling berkaitan.

SIMPULAN

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Rantawan dan Desa Datu Kuning secara umum telah berjalan cukup baik, tetapi belum optimal. Pada indikator informasi, Dinas Sosial, pendamping, pemerintah desa, RT, kantor pos, dan komunikasi antarwarga telah membentuk saluran penyampaian informasi. Namun, sosialisasi khusus BPNT belum rutin, materi sering bercampur dengan program lain, dan pemahaman penerima belum seragam. Pada indikator isi kebijakan, tujuan program sesuai dengan kebutuhan pangan dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Masalah masih muncul pada ketepatan sasaran, keterlambatan penyaluran, pemanfaatan bantuan, dan penjelasan mengenai keluarga yang menerima BPNT serta PKH secara bersamaan.

Dukungan masyarakat tergolong cukup positif melalui kehadiran dalam kegiatan, pemenuhan dokumen, penerimaan manfaat, dan pelaporan perubahan data. Dukungan belum maksimal karena kesadaran administrasi dan inisiatif pengaduan berbeda antarwarga. Pada indikator pembagian potensi, tugas pemerintah pusat, Dinas Sosial, pendamping, desa, RT, penyalur, dan masyarakat telah terbagi relatif jelas. Namun, desa memiliki kewenangan terbatas untuk memperbaiki data, sedangkan proses verifikasi dan umpan balik masih lambat. Faktor pendukung mencakup regulasi, koordinasi, komitmen pelaksana, sistem penyaluran, dan penerimaan masyarakat. Faktor penghambat mencakup ketidakakuratan data, sosialisasi terbatas, kendala jaringan dan kartu, keterlambatan pencairan, keterbatasan pelaksana, serta akses penerima lanjut usia.

Perbaikan implementasi perlu diarahkan pada empat tindakan yang saling terhubung. Dinas Sosial, pendamping, dan desa perlu menyusun sosialisasi terjadwal dengan materi khusus BPNT. Pemerintah perlu menetapkan siklus pemutakhiran data yang jelas, memberi bukti dan status tindak lanjut bagi setiap usulan, serta mempercepat sinkronisasi data kependudukan. Lembaga penyalur perlu memperkuat jaringan, distribusi kartu, mesin transaksi, dan layanan bagi penerima yang

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

kesulitan mengakses titik pencairan. Pemerintah desa juga perlu menyediakan pengaduan yang sederhana dan melindungi data pribadi penerima. Langkah tersebut dapat meningkatkan ketepatan sasaran, mengurangi kecemburuan sosial, dan memperkuat akuntabilitas Program BPNT.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2020) Dasar-dasar kebijakan publik. Edisi revisi ke-2. Bandung: Alfabeta.

Fiantika, F.R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami and Waris, L. (2022) Metodologi penelitian kualitatif. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.

Hardani, Auliya, N.H., Andriani, H., Fardani, R.A., Ustiawaty, J., Utami, E.F., Sukmana, D.J. and Istiqomah, R.R. (2020) Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Kadji, Y. (2015) Formulasi dan implementasi kebijakan publik: Kepemimpinan dan perilaku birokrasi dalam fakta realitas. Gorontalo: UNG Press.

Kementerian Sosial Republik Indonesia (2017) Pedoman umum bantuan pangan non tunai. Jakarta: Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Mufatiroh, E., Ratnawati, S. and Kurniawan, B.A. (2021) "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sumput Kecamatan Driyorejo", Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi, 8(2).

Nirmawati (2025) Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Skripsi. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Pemerintah Republik Indonesia (2023) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Pramono, J. (2020) Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Surakarta: UNISRI Press.

Syaputra, E. (2023) "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah.